

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Eko Nursalim

STAI Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia

ekonursalim99@gmail.com

Hasan

STIQ Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia

hasanbanjary@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan adanya persoalan lembaga pendidikan termasuk di dalam pendidikan Islam yang salah satunya memiliki tujuan mendidik seluruh masyarakat sehingga siap menghadapi problem atau permasalahan yang terjadi dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Namun pada kenyataannya, pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini gagal memberikan solusi bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Kondisi seperti ini menciptakan sikap pesimis yang ditemukan di masyarakat dan membuat sistem pendidikan Islam semakin terpinggirkan. Seharusnya semua kegiatan pendidikan ditujukan untuk melibatkan semua tingkatan komponen pendidikan, termasuk masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masyarakat tidak mendapatkan tempat yang layak sebagai subjek yang memainkan peran penting dalam setiap kebijakan pendidikan. Kajian library research digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti menganalisis serta menelaah sumber pustaka yang berkaitan dengan pendidikan islam yang berbasis pada pengembangan masyarakat berdasarkan temuan dan teori dari berbagai literatur. Hasilnya pendidikan islam berbasis pengembangan masyarakat muncul dari keinginan masyarakat untuk memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan islam, kelebihanannya yaitu adanya motivasi beragama, semangat mengajarkan ilmu pengetahuan dan kemandirian dalam mengelola. Sedangkan kelemahannya terdapat pada keadaan finansial, manajemen kelembagaan dan pengembangan program unggulan.

Kata kunci: Lembaga, Pendidikan Islam, Pengembangan Masyarakat.

Abstract

This research was carried out regarding the problems of educational institutions including in Islamic education, one of which aims to educate the whole community so that they are ready to face problems or the problems that occur and can solve them properly. But in reality, Islamic education in Indonesia has failed to provide a solution for the whole society, especially Muslims. Conditions like this create a pessimistic attitude and marginalize the Islamic education system. All educational activities should involve all levels of the educational component, including the community. However, society does not get a proper place as a subject that plays an important role in every education policy. Library research studies were used in this study, where researchers analyzed and examined literature related to Islamic education based on community development based on findings and theories from various kinds of literature. The result is that Islamic education based on community development arises from the desire of the community to deepen and add to Islamic knowledge, the advantages of which are religious motivation, enthusiasm for teaching science, and independence in managing. While the weaknesses are in the financial situation, institutional management, and development of flagship programs.

Keywords: Islamic Education, Community Development.

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia seutuhnya di segala aspek kehidupan sebenarnya merupakan hakikat dari pembangunan nasional yang pelaksanaannya memerlukan peran serta dari semua lapisan baik dari lapisan pemerintah maupun pada lapisan masyarakat pada umumnya. Beberapa aspek yang harus ditingkatkan ialah di bidang sikap, keterampilan serta peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai bentuk upaya dalam menyiapkan SDM yang handal maka pendidikan dianggap paling berperan dalam membentuk kemampuan tersebut. Dengan adanya pendidikan, diharapkan masyarakat akan mampu menghadapi tantangan di masa depan dengan menjadi insan yang cerdas, terampil, mandiri dan bertanggung jawab.¹

Saat ini pendidikan di Indonesia secara modern telah berkembang yang memiliki tujuan untuk mengembangkan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masyarakat tidak mendapatkan kesempatan sebagai pelaku menentukan kebijakan regulasi pendidikan. Pendidikan kita kurang demokratis dan lebih terpusat. Sentralisasi ini menyebabkan hilangnya kemandirian semua komponen pelaksanaan pendidikan, yang, pada gilirannya, membekukan semua organ pendidikan dan kehilangan kreativitas serta objektivitas yang nyata.²

Menurut Azumardi Azra, seperti dikutip Faisal Jalal, arah pendidikan dengan berbagai alatnya sudah tidak pasti sejak jatuhnya rezim baru pada Mei 1998. Pada era tersebut, terjadi reformasi besar-besaran di lapisan masyarakat, dan ini menjadi bukti tanda kegagalan dalam pembangunan bangsa dan negara.³ Pengabaian beberapa aturan dan regulasi lama yang dianggap tidak relevan dimulai. Pada saat yang sama, aturan dan peraturan baru yang berlaku, yang diharapkan dapat mengubah situasi menjadi lebih baik, belum berlalu. Bahkan, tampaknya masyarakat sangat perlu berada pada isu-isu pendidikan yang strategis.⁴

Upaya menyelesaikan masalah di atas, yaitu dengan adanya perubahan regulasi di bidang pendidikan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 13, secara eksplisit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan dalam posisi pendidikan yang formal, informal dan nonformal bisa memperkuat satu dengan yang lainnya, sehingga lebih terintegrasi dan lebih berimbang. Karena tidak akan mungkin bisa saling memperkuat dan melengkapi jika salah satu baik pendidikan formal, informal maupun non formal tidak sama-sama berperan aktif di masyarakat. Output dari pendidikan informal juga diakui sejajar dengan pendidikan formal dan nonformal setelah

¹ Enceng Mulyana, *Model Tukar Belajar* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 2.

² Muhyi Batubara, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Ciputat Press, 2004), 119.

³ Faisal Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: Remaja Rosda Karya, 2001), 67.

⁴ Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep Dan Strategi Implementasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

siswanya menyelesaikan dan lulus pada ujian nasional yang telah sesuai dengan standar pendidikan nasional.⁵

Lahirnya demokratisasi pendidikan tidak ditujukan untuk mengatasi beberapa masalah pendidikan, seperti penghapusan diskriminasi dalam pendidikan dan akses ke pendidikan yang murah dan berkualitas, tetapi setidaknya memberikan kesempatan bagi berbagai bidang kehidupan agar bisa lebih berkarya. Pendidikan yang berbasis pengembangan masyarakat dapat menjadi pilihan terbaik dalam memberikan peluang bagi pengembangan lembaga pendidikan.⁶ Konsep demokratisasi yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan tertuang pada Bab III UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 di bagian pasal 4 ayat 1.

Di dalam demokratisasi pada pendidikan dapat dicapai dengan menerapkan desain instruksional umum dalam pendidikan secara nasional, dimana pendidikan yang lebih demokratis secara umum akan bersifat politis dalam kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah di bidang pendidikan secara nasional. Jika idealisme demokrasi dipraktekkan di dunia pendidikan, maka jalur pendidikan mestinya mustahil menjadi sebuah alat bagi penguasa. Kebijakan pendidikan memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam memberikan pemikiran terhadap kemajuan pendidikan secara nasional.⁷ Kebijakan pendidikan ini, juga perlu diterapkan pada lembaga pendidikan islam yang sama-sama memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Sebagaimana diungkapkan oleh penelitiannya Moch. Miftachul Choiri bahwa di lembaga pendidikan islam khususnya di Madrasah merupakan tempat belajar agama islam yang mempunyai keunikan tersendiri, dan kebanyakan berdirinya lembaga pendidikan madrasah dipelopori adanya semangat dari masyarakat dan hasil dari pembelajarannya juga menjadi bervariasi. Jika di awal pendirian madrasah itu memiliki sumber daya dukung ekonomi yang kuat biasanya akan tumbuh berkembang dengan cepat dan begitu sebaliknya, sehingga dibutuhkan upaya yang jelas agar pendidikan islam tetap dapat berkembang dengan baik.⁸

Begitu juga diperjelas dalam penelitiannya Sodiah, alur birokrasi yang berliku-liku yang dilalui pada proses perijinan di lembaga pendidikan, khususnya pada pendidikan islam semakin memperlambat kemajuan dari output pembelajaran, sehingga dibutuhkan tahapan yang jelas dan

⁵ Ahmad Tarmizi Hasibuan and Ely Rahmawati, "Pendidikan Islam Informal Dan Peran Sumber Daya Manusia Dalam Perkembangan Masyarakat: Studi Evaluasi Teoritis," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (February 15, 2022): 24–37, accessed September 19, 2022, <https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/tarbiyatuna/article/view/1182>.

⁶ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21* (Yogyakarta: Safinia Insania Press, 2003), 85.

⁷ Kartono Kartini, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik Dan Sugesti* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 196–197.

⁸ Moh. Miftachul Choiri, "Pemberdayaan Madrasah Dan Pendidikan Berbasis Masyarakat," *Jurnal Tarbiyah* 21, no. 2 (December 1, 2014): 337–353, accessed September 19, 2022, <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/17>.

terbuka dari pihak pemerintah. Pendidikan islam yang berbasis pada manajemen pengembangan masyarakat masih memberikan peluang besar dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan islam itu sendiri.⁹

Jika memperhatikan ulasan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka pendidikan islam sebenarnya menjadi bagian yang sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan dari pendidikan nasional, karena Indonesia yang kebetulan merupakan penduduk muslim terbesar belum mampu menunjukkan identitasnya sebagai masyarakat yang mapan dan mandiri dalam menerapkan pendidikan islam yang berbasis pada pengembangan masyarakat. Kiranya sangatlah perlu dirumuskan formula konsep pendidikan Islam yang peduli terhadap dinamika masyarakat. Maka dalam tulisan ini akan dibahas pendidikan Islam berbasis pengembangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pustaka (*library research*) yang digunakan pada penelitian ini, yakni objek penelitian yang akan dibahas dengan menggunakan sumber dari literatur seperti buku, surat kabar, prosiding, jurnal penelitian dan semacamnya.¹⁰ Tahapan yang akan ditempuh peneliti antara lain membaca dan menelaah dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan ruang lingkup pada pendidikan khususnya pendidikan islam yang berbasis pengembangan masyarakat.

Dengan studi pustaka ini, peneliti tidak perlu datang langsung ke lapangan untuk mengecek keabsahan data di lapangan atau informasi yang ada di masyarakat, namun peneliti akan lebih mengoptimalkan waktu untuk menganalisis sumber-sumber primer dari berbagai literatur baik dari buku dan hasil-hasil penelitian terdahulu agar memperoleh data yang lebih akurat.

Pendekatan deskriptif juga diterapkan dalam penelitian ini, yakni dengan mengulas dan mendeskripsikan fakta-fakta yang nampak, proses permasalahan yang terjadi, serta sebab dan akibat dari kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang berkembang.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Pendidikan Islam Berbasis Pengembangan Masyarakat

Beberapa definisi pendidikan Islam yang dikemukakan oleh salah satunya Al-Shaibani bahwa pendidikan Islam mengubah proses perilaku murid dalam hidup kesehariannya, dalam masyarakat serta kehidupan yang berkaitan dengan alam lingkungannya. Pada proses seperti ini

⁹ Sodiah, "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat Dan Sekolah," *Sosial Budaya* 13, no. 1 (May 7, 2016): 89–100, accessed September 19, 2022, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/3468>.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

¹¹ Sumanto, *Teori Dan Metode Penelitian* (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014), 179.

dimana diterapkan salah satunya melalui proses mengajar dimana sebagai bentuk kegiatan serta sebagai salah profesi yang mendasar yang terdapat di masyarakat.¹² Pada saat yang sama, Ahmad memberikan istilah pendidikan Islam sebagai panduan yang diterapkan seseorang untuk berkembang secara optimal sesuai dengan ajaran nilai-nilai Islam.¹³ Sehingga definisi inilah yang lebih menfokuskan dalam proses sebuah pendidikan yang berguna untuk menciptakan semua kemampuan yang dimiliki murid, yaitu penggalian potensi pada intelektual dan potensi spiritual. Dasar pada proses pembangunan ini diharuskan dapat sesuai pada ajaran nilai-nilai Islam.¹⁴

Demikian halnya, Ramayulis juga ikut mendefinisikan pendidikan dalam Islam merupakan proses menekankan asimilasi sebuah pengetahuan dan nilai-nilai pada ajaran Islam siswa dengan cara pengajaran, kebiasaan, bimbingan, pelatihan, pemantauan dan juga aspek pengembangan potensi diri, untuk mencapai harmoni dan kesempurnaan hidup.¹⁵ Pemahaman tersebut dimana dapat dilihat bahwa sudah terlihat adanya beberapa yang membedakan antara ruang lingkup pendidikan Islam dan ruang lingkup pendidikan umum. Tentunya akan berakibat pada konsep pendefinisian serta bangunan kerangka pendidikan Islam. Definisi tersebut tentunya akan memberikan sedikit letak berbedaan jika dibandingkan pada definisi pendidikan Islam. Akhirnya, perbedaan kecil ini sebenarnya disebabkan oleh fondasi filosofis yang berbeda. Baik dari segi epistemologi, ontologi, maupun aksiologi. Selain aspek filosofis, perbedaan berikutnya adalah terletak pada sistem.¹⁶ Berdasarkan pandangan Ramayulis, perbedaan yang terlihat pada kedua sistem di atas dimana terletak dalam sistem ideologis dan nilai serta orientasi atau tujuan. Sistem pendidikan Islam memiliki ideologi monoteisme yang berasal dari wahyu Al-Quran serta Sunnah Rasulullah, sedangkan pendidikan yang non-Islam mempunyai ideologi serta keyakinan yang berbeda, seperti aspek kapitalis, sosialis, ateis, komunis serta materialis. Al-Quran dan Sunnah Nabi dan ijtihad pada manusia merupakan sumber pendidikan islam, sementara pendidikan yang non-Islam berasal dari nilai-nilai ajaran selain dua nilai yang termasuk hasil dari pemikirannya manusia, misalnya adat istiadat, ide, serta kepercayaan. Dalam hal orientasi,

¹² Omar Muhammad At-Thoumy Al-Syaibaniy, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 399.

¹³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), 32.

¹⁴ Usman Abu Bakar, "Paradigma Pendidikan Islam: Tinjauan Epistemologi," *Millah: Jurnal Studi Agama* 9, no. 2 (February 15, 2010): 287–300, accessed September 19, 2022, <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/5221>.

¹⁵ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), 30.

¹⁶ Keniya Adikaputri and Achmad Kurniawan Pasmadi, "Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam; Book Review Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik Karya Abdurrahman Mas'ud," *Jurnal Didaktika Islamika* 11, no. 1 (February 1, 2020): 110–123, accessed September 19, 2022, <https://jurnal.stitmkendal.ac.id/index.php/home/article/view/46>.

kebutuhan akhirat lebih ditekankan pada pendidikan Islam, sementara kebutuhan global kebanyakan lebih difokuskan pada pendidikan yang non-Islam.¹⁷

Sihombing menyatakan pendidikan yang umumnya berbasis pengembangan masyarakat dimana prosesnya diawali kemudian diimplementasikan, dievaluasi serta dikelola masyarakat dengan tujuan berupaya menjawab persoalan dan potensi di masa depan. pendidikan seperti ini diibaratkan "*dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat*". Sihombing menekankan bentuk pendidikan seperti ini lebih merujuk pada pendidikan luar sekolah, karena pendidikan luar sekolah bergantung pada masyarakat dan bukan pemerintah. Model tersebut dapat berupa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang akan dikembangkan oleh masyarakat.¹⁸

Sebagaimana keterangan dari Toto Suharto, pendidikan yang berbasis pengembangan pada masyarakat berbeda dengan pendidikan yang diatur oleh negara. Apabila pendidikan yang diatur negara didefinisikan sebagai proses tahapan dalam pendidikan yang berupaya membangun segala potensi serta partisipasi oleh masyarakat, sedangkan pendidikan yang berbasis pengembangan pada masyarakat adalah respon negara yang tidak dapat melayani penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan yang membangun dalam bidang perekonomian, pelayanan kesehatan, serta pendidikan.¹⁹

Penjelasan dari Zubaidi, pendidikan yang berbasis pengembangan pada masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari budaya dan masyarakat di mana ia diajarkan. Hal itu selalu dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat. Sementara pendidikan umum jarang dilakukan oleh negara. Sebab, masalah pendidikan yang berbasis pengembangan pada masyarakat berkaitan dengan adanya keterkaitan antara negara yang memiliki kekuasaan dengan masyarakat yang mengalami kemiskinan, jadi bukan semata-mata hanya keinginan masyarakat ikut campur dalam mengelola pendidikan. Akhirnya paradigma konflik menjadi persepsi yang terjadi di masyarakat.²⁰

Nasikun juga ikut mengungkapkan, adanya perbedaan cara pandang masyarakat dengan pemerintah dalam mengelola pendidikan yang berujung pada perubahan sosial menjadi penyebab paradigma konflik ini tidak pernah selesai. Di pihak penguasa mempertahankan *status quo* sementara masyarakat menginginkan perubahan atau reformasi. Kedua kelompok ini selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan untuk mempertahankan kepentingan mereka. Ada tiga cara dalam pengendalian konflik, antara lain konsiliasi kemudian mediasi serta arbitrase. Dari ketiga cara di atas efektif untuk mekanisme dalam tahapan mengendalikan konflik.²¹ Sependapat dengan

¹⁷ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 35.

¹⁸ Sihombing Umberto, *Konsep Dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 17.

¹⁹ Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012), 37.

²⁰ Zubaidi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 45.

²¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 25.

Cunningham, golongan anti-status quo yaitu masyarakat atau rakyat dan golongan atau komunitas pro-status quo yaitu pemerintah selalu menjadi konflik yang tiada akhir yang akan menjadi penyebab dari perubahan sosial.²²

Jika ditelaah secara historis, munculnya lembaga pendidikan Islam yang berbasis pada perkembangan masyarakat bersumber dari kebutuhan masyarakat untuk menambah atau memperkaya pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Semakin banyak pemeluk agama Islam pada masa itu dan sampai saat ini tentunya memerlukan pendidikan yang berkualitas. Oleh karenanya berdasarkan keinginan luhur masyarakat, segala ide muncul untuk lebih mengatur nilai-nilai dalam ajaran Islam yang berbentuk seperti pada lembaga pendidikan serta kurikulum dalam pendidikan.²³ Dalam pandangan Hassan Abd al-Ali yang seperti telah dikutip oleh Zakiah Darajat bahwa dalam Pendidikan Islam telah mengetahui lembaga pendidikan mulai pertama wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya tempat rumahnya Arqam ibn Abi al-Arqam adalah awal tempat pembelajaran dan pendidikan, dan Rasulullah Muhammad sebagai orang yang pertama kali mengajar.²⁴

Al-Syaibaniy menuturkan contoh pendidikan Islam yang dapat dijadikan model yang berbasis pada pengembangan masyarakat yaitu pesantren, dengan bercirikan kurikulum yang mandiri, pembiayaan mandiri dan memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Pondok pesantren ini muncul di Indonesia berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tidak perlu membatasinya pada peraturan resmi pemerintah. Dengan demikian, fenomena yang terlihat di pesantren dapat ditentukan sebagai model alternatif bagi sarana pengembangan dalam pendidikan Islam di masyarakat, khususnya dalam hal kemandiriannya dari birokrasi pemerintah.²⁵

Implikasinya dari pendidikan berbasis masyarakat sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi rakyat antara lain; 1) memberdayakan rakyat, 2) kesempatan rakyat mengoptimalkan ketrampilan atau kemampuan, 3) kebebasan untuk merancang, mengoperasionalkan, mengatur keuangan, mengawasi dan mengevaluasi dirinya sendiri.²⁶

Konsep *Community-Based Education (CBE)*

Lahirnya konsep ini dalam pendekatan filosofis membutuhkan struktur administrasi pendidikan yang harus disesuaikan dengan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat

²² P.M Cunningham, *Community Education and Community Development* (Oxford: Pergamon, 1994), 71.

²³ Najahah, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Lentera* (2007): 134–147.

²⁴ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 27.

²⁵ Al-Syaibaniy, *Falsafah Pendidikan Islam*, 82.

²⁶ Dean Nielsen, *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Indonesia* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 43.

dalam struktur administrasi pendidikan ditujukan dalam rangka inisiatif pemikiran masyarakat untuk mendirikan atau menyiapkan tempat belajar yang layak.

Menurut Tilaar, istilah *Community Based Education* (CBE) ini digunakan sebagai bentuk gambaran partisipasi rakyat dalam praktik pendidikan. *Community Based Education* memfokuskan masyarakat (seperti orang tua, tokoh masyarakat, tokoh nasional, dunia kerja, dan dunia industri) untuk mendukung bersama dan mengawasi lembaga pendidikan di sekitarnya.²⁷ Sangat penting untuk melihat partisipasi masyarakat lokal dalam pengendalian praktik pendidikan terkait praktik pendidikan yang dilakukan sampai saat ini oleh satuan pendidikan dan yang telah dipraktikkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kontribusi masyarakat terhadap peningkatan lembaga pendidikan, dan fungsi lembaga pendidikan yang menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar sehingga ketika peserta didik menyelesaikan program yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sehingga dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸ Konsep CBE ini menurut Umberto Sihombing, yaitu pendidikan yang didirikan dari keinginan rakyat, dikelola oleh rakyat dan manfaatnya untuk rakyat, diimplementasikan dalam rangka memenuhi keinginan belajar dari masyarakat, oleh karenanya pendidikan seperti ini lebih banyak mengoptimalkan peran pokok masyarakat dibandingkan dengan peran negara.²⁹

Istilah *community* lebih menunjukkan pada sejumlah orang yang menempati daerah tertentu dengan semua ikatan aturan dan kriteria yang ditemukan di dalamnya.³⁰ Hasinggahan Lubis meringkas dalam uraian UU Sistem Pendidikan Nasional, bentuk pendidikan yang berbasis pengembangan pada masyarakat antara lain; 1) pesantren, konteksnya bagian dari pendidikan luar sekolah, 2) lembaga pendidikan swasta formal dan non formal, 3) tempat pelatihan atau kursus, 4) pendidikan pelatihan (diklat).³¹

Dalam CBE ini, juga terdapat program layanan yang diimplementasikan antara lain³²; 1). Pendidikan literasi, 2). Pendidikan paket A, paket B dan paket C, 3). PAUD, Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain, 4). Bimbingan Konseling, 5). Bimbingan karir.

²⁷ Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Bandung: Rineka Cipta, 2004), 52.

²⁸ Toto Suharto, "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat," *Cakrawala Pendidikan* 3, no. January (2016): 324–343, https://www.researchgate.net/profile/Toto-Suharto/publication/289671874_CAKRAWALA_PENDIDIKAN_Toto_Suharto.

²⁹ Umberto, *Konsep Dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*, 89.

³⁰ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Cet. IX. (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 61.

³¹ Hasinggahan Lubis, "Paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community Based Education)," *Muqaddimah: Jurnal Studi Islam* 14, no. 3 (2018): 1–20, accessed September 19, 2022, <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/muqaddimah/article/view/1>.

³² Halimatun Syakdiah, "Paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community Based Education)," *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2019): 86–95, accessed September 19, 2022, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/2446>.

Kelebihan dan Kelemahan Pendidikan Islam Berbasis Pengembangan Masyarakat

Beberapa kelebihan dari pendidikan islam berbasis pengembangan masyarakat, antara lain:³³

Pertama, motivasi beragama. Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas umat Islam meyakini bahwa harta merupakan amanah dari Allah yang wajib disalurkan pada kemaslahatan seperti membangun pesantren, madrasah, musholla, majelis ta'lim dan sebagainya. Dan orang yang kaya serta beriman akan lebih termotivasi untuk membelanjakan hartanya untuk kepentingan agama.

Kedua, semangat mengajarkan ilmu pengetahuan. Seseorang dalam beragama ketika ingin beribadah harus sesuai dengan ilmu atau aturan yang sesuai dengan ajaran agama, maka orang tersebut wajib menuntut ilmu dan bagi yang memiliki pengetahuan wajib mengajarkan kepada orang membutuhkan.

Ketiga, kemandirian dalam mengelola. Dengan adanya ini membuka peluang dan potensi untuk mendirikan lembaga pendidikan yang berkualitas dan juga mampu berdaya saing dengan lembaga pendidikan pemerintah.

Sementara itu, setidaknya juga terdapat kelemahan yang muncul terkait pendidikan islam berbasis pada pengembangan masyarakat ini, antara lain:³⁴

Pertama, keadaan finansial. Bagi lembaga pendidikan islam yang kurang mampu dalam pengelolaan finansial, maka biasanya lembaga tersebut akan pelan-pelan menurun kualitasnya karena disebabkan minimnya dalam pemenuhan fasilitas sarana prasarana pendidikan. *Kedua*, manajemen kelembagaan. Sebuah lembaga sangat perlu mengoptimalkan fungsi manajemen, dan biasanya karena pendidikan islam berbasis pengembangan masyarakat ini kurang menguasai fungsi manajemen maka dikhawatirkan lembaga tersebut akhirnya akan mengalami penurunan kualitas lulusan dan *ketiga*, pengembangan program unggulan. Pada dasarnya lembaga pendidikan akan cepat dikenal oleh masyarakat apabila memiliki beberapa kegiatan atau program unggulan, dengan harapan agar mampu bersaing secara global, dan pada beberapa kasus di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan islam yang dikelola oleh masyarakat belum mampu menciptakan program-program unggulan sehingga terkesan kegiatan pembelajarannya tidak bervariasi dan monoton.

³³ Abdul Malik and Sabar Narimo, "Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat Di Temanggung," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (February 13, 2018): 6–12, accessed September 19, 2022, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/7748>.

³⁴ Hasibuan and Rahmawati, "Pendidikan Islam Informal Dan Peran Sumber Daya Manusia Dalam Perkembangan Masyarakat: Studi Evaluasi Teoritis."

KESIMPULAN

Pendidikan islam berbasis pengembangan masyarakat diimplementasikan sebagai bentuk eksplorasi cita-cita dan keinginan masyarakat dalam memperkuat sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama Islam. Sehingga ketika siswa sudah mendapatkan pembelajaran di lembaga pendidikan formal yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI), maka bisa memperdalam ilmu agama melalui pendidikan islam yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat. Secara ringkas konsep pendidikan seperti ini dikenal dengan istilah *Community Based Education* (CBE) yang implementasinya diawali dari keinginan masyarakat, kemudian dikelola oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat.

Evaluasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan bagi pendidikan islam yang dikelola oleh masyarakat, dimana hasil evaluasi akan menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Sehingga apabila ditemukan kelemahan-kelemahan dapat segera dicarikan solusi yang terbaik dan apabila ada prestasi yang diperoleh oleh lembaga bisa dipertahankan serta dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikaputri, Keniya, and Achmad Kurniawan Pasmadi. "Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam; Book Review Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik Karya Abdurrahman Mas`ud." *Jurnal Didaktika Islamika* 11, no. 1 (February 1, 2020): 110–123. Accessed September 19, 2022. <https://jurnal.stitmkendal.ac.id/index.php/home/article/view/46>.
- Al-Syaibaniy, Omar Muhammad At-Thoumy. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Bakar, Usman Abu. "Paradigma Pendidikan Islam: Tinjauan Epistemologi." *Millah: Jurnal Studi Agama* 9, no. 2 (February 15, 2010): 287–300. Accessed September 19, 2022. <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/5221>.
- Choiri, Moh. Miftachul. "Pemberdayaan Madrasah Dan Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Tarbiyah* 21, no. 2 (December 1, 2014): 337–353. Accessed September 19, 2022. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/17>.
- Cunningham, P.M. *Community Education and Community Development*. Oxford: Pergamon, 1994.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Dean Nielsen. *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Indonesia*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep Dan Strategi Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Hasibuan, Ahmad Tarmizi, and Ely Rahmawati. "Pendidikan Islam Informal Dan Peran Sumber Daya Manusia Dalam Perkembangan Masyarakat: Studi Evaluasi Teoritis." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (February 15, 2022): 24–37. Accessed September 19, 2022. <https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/tarbiyatuna/article/view/1182>.

- Jalal, Faisal. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Kartini, Kartono. *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik Dan Sugesti*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Lubis, Hasinggahan. "Paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community Based Education)." *Muqaddimah: Jurnal Studi Islam* 14, no. 3 (2018): 1–20. Accessed September 19, 2022. <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/muqaddimah/article/view/1>.
- Malik, Abdul, and Sabar Narimo. "Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat Di Temanggung." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (February 13, 2018): 6–12. Accessed September 19, 2022. <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/7748>.
- Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safinia Insania Press, 2003.
- Muhyi Batubara. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Mulyana, Enceng. *Model Tukar Belajar*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Najahah. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Lentera* (2007): 134–147.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2013.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Cet. IX. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Sodiah. "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat Dan Sekolah." *Sosial Budaya* 13, no. 1 (May 7, 2016): 89–100. Accessed September 19, 2022. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/3468>.
- Suharto, Toto. "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Cakrawala Pendidikan* 3, no. January (2016): 324–343. https://www.researchgate.net/profile/Toto-Suharto/publication/289671874_CAKRAWALA_PENDIDIKAN_Toto_Suharto.
- . *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012.
- Sumanto. *Teori Dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014.
- Syakdiah, Halimatun. "Paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community Based Education)." *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2019): 86–95. Accessed September 19, 2022. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/2446>.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.
- Tilaar. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Bandung: Rineka Cipta, 2004.
- Umberto, Sihombing. *Konsep Dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Zubaidi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.